

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Agama Islam diturunkan ke dunia adalah sebagai *rahmatan lil alamin*. Dalam konteks kerahmatan ini terdapat pada semua aspek penting dalam kehidupan manusia adalah senantiasa terjaga oleh Islam. Sayyid Sabiq menyatakan, tujuan Islam adalah menjaga agama (*hifzh al-din*), menjaga jiwa (*hifzh al-nafs*), menjaga akal (*hifzh al-aql*), menjaga keturunan (*hifzh al-nasl*) dan menjaga harta (*hifzh al-mal*).¹

Tujuan Islam di atas akan tercapai, jika setiap muslim memiliki ilmu pengetahuan, baik pengetahuan agama maupun pengetahuan umum dan keterampilan. Dengan ilmu agama, manusia dapat menjaga, mengamalkan ajaran agamanya, menjaga jiwa dan akal serta keturunannya. Dengan ilmu pengetahuan umum, wawasan hidupnya menjadi luas dan pemahaman agamanya tidak sempit. Adapun dengan keterampilan ia dapat berusaha dengan keterampilannya sehingga harta yang diperolehnya jadi halal dan dapat hidup mandiri. Tujuan pokok dari pendidikan Islam adalah mendapatkan keselamatan agama dan sukses di dunia, yang didahului terciptanya akhlak dan jiwa yang mantap disertai keterampilan untuk hidup mandiri dan terhormat di tengah masyarakat.²

¹Syaikh Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid I, (Beirut: Dar al-Fikr, 1403 H), h. 10.

²Mohammad Athiyah al-Abrasyi, *Dasar-dasar Pokok Pendidikan Islam*, Alih bahasa Bustami Abdulghani, (Jakarta: Bulan Bintang, 1980), h. 1, 4.

Mengingat pentingnya pendidikan khususnya pendidikan agama Islam, maka Islam menempatkan menuntut ilmu sebagai kewajiban bagi setiap muslim.³ Agar kewajiban ini terwujud, maka tentunya harus ada lembaga pendidikan, terutama pendidikan pesantren. Sehingga perlu pengelolaan dan manajemen yang baik untuk kemajuan pendidikan Islam, sebagaimana firman Allah Swt dalam surah As Sajdah ayat 5 yaitu :

يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ ﴿٥﴾

Artinya : Dia mengatur urusan dari langit ke bumi, kemudian (urusan) itu naik kepadanya dalam satu hari yang kadarnya adalah seribu tahun menurut perhitunganmu.

Dan juga terdapat pada surah Yunus ayat 31 yaitu :

قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ ﴿٣١﴾

Artinya : Katakanlah: "Siapakah yang memberi rezki kepadamu dari langit dan bumi, atau siapakah yang Kuasa (menciptakan) pendengaran dan penglihatan, dan siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup[689] dan siapakah yang mengatur segala urusan?" Maka mereka akan menjawab: "Allah". Maka Katakanlah "Mangapa kamu tidak bertakwa kepada-Nya)?"

³al-Imam Jalaluddin bin Abdirrahman bin Abibakar al-Suyuthi, *al-Jamiush Shaghir*, Juz 2, (Surabaya: Dar al-ihya, tth), h. 54.

Secara yuridis pelaksanaan pendidikan di Indonesia merupakan tanggung jawab pemerintah. Semua rakyat Indonesia tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan dan strata sosial ekonominya, tanpa kecuali mereka berhak untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Di dalam Pasal 31 Ayat (1) dan (2) UUD 1945 diterangkan, tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran, pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional, yang diatur dengan undang-undang.

Adapun berdasarkan ketentuan UUD 1945 Pasal 31 dan peraturan lain yang menyertainya yang diupayakan pula dengan pencanangan program wajib belajar pendidikan dasar, maka seyogyanya tanggung jawab pendidikan sepenuhnya berada di tangan pemerintah sebagai penyelenggara negara. Namun mengingat keterbatasan pemerintah baik di segi dana, tenaga, sarana dan fasilitas, maka sejak awal dijalankannya pendidikan, pemerintah sudah menekankan pentingnya keterlibatan atau partisipasi aktif dari masyarakat. Karena itu pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat dan pemerintah. Hal ini sejalan pula dengan ketentuan pasal 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan: Masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi program pendidikan. Masyarakat berkewajiban memberi dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan.⁴

⁴Dedi Hamid, *Sistem Pendidikan Nasional*, (Jakarta: Durat Bahagia, 2004), h. 7.

Sejarah awal lahirnya pesantren memiliki misi khusus, antara lain *pertama*, sebagai wahana kaderisasi ulama yang nantinya diharapkan mampu menyebarkan agama di tengah-tengah masyarakat; *kedua*, membentuk jiwa santri yang memiliki kualifikasi moral-etik dan religius; *ketiga*, menanamkan kesadaran holistik bahwa menuntut ilmu merupakan suatu keharusan dan pengabdian kepada Sang *Khaliq*, bukan hanya untuk mengejar prestasi dunia semata.⁵

Keberadaan Pondok Pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia, telah tumbuh dan berkembang sejak masa penyiaran Islam dan telah banyak berperan dalam mencerdaskan kehidupan masyarakat. Sejarah perkembangan Pondok Pesantren menunjukkan bahwa lembaga lembaga ini tetap eksis dan konsesten menjalankan fungsinya sebagai pusat pengajar ilmu-ilmu agama Islam (*tafaqquh fiddin*) sehingga dari pesantren lahir kader ulama, guru agama, mubaligh yang sangat dibutuhkan masyarakat.

Seiring dengan perkembangan zaman, pendidikan di pondok pesantren juga mengalami pembaharuan dan perkembangan khususnya kurikulum dan metode pembelajarannya. Sebagia pesantren telah mengakomodasikan program pendidikan madrasah atau sekolah, dan sebagian lagi tetap mempertahankan pola pendidikan khas pesantren yang telah lama berlaku di pesantren baik kurikulum maupun metode pembelajarannya, sehingga seiring disebut pondok pesantren salafiah dan pondok pesantren khalafiah.

Dalam rangka meningkatkan peran Pondok Pesantren Salafiah, sebagai lembaga pendidikan masyarakat, serta untuk membuka kesempatan bagi para

⁵Sulthon Masyhud, dkk., *Manajemen Pondok Pesantren*, (Jakarta : Diva Pustaka, 2003), h.6

santri yang ingin menuntut ilmu kejenjang yang lebih tinggi, telah dilakukan kesepakatan bersama antara Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Agama melalui Surat Keputusan Bersama Nomor: 1/U/KB/2000 dan Nomor : MA/86/2000 tentang Pondok Pesantren Salafiah sebagai Pola Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun. Kesempatan tersebut telah ditindak lanjuti dengan Keputusan Bersama Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama dengan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Nomor : E/83/2000 dan Nomor : 166/C/kep/DS/2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pondok Pesantren Salafiah sebagai Pola Wajib Belajar Pendidikan Dasar.⁶

Dalam mengelola pendidikan pondok pesantren tersebut, masyarakat mengerahkan kemampuannya secara swadaya, mulai dari pendanaan, pengadaan tenaga pendidikan, kurikulum dan sebagainya. Semuanya biasanya menjadi tanggung jawab organisasi pendidikan (yayasan) yang menyelenggarakannya. Suatu lembaga pendidikan pesantren dapat bertahan, apabila didukung dengan manajemen atau pengelolaan pesantren yang baik.

Pemerintah Indonesia memberikan perhatian dan dukungan yang sangat baik terhadap pendidikan agama khususnya pendidikan di pesantren, ini dibuktikan dengan sebagian dana pemerintah disalurkan melalui kementerian agama dibidang pontren (pendidikan pesantren) yang khusus menangani pendidikan di pesantren dan santri alumni pesantren diberikan kesempatan yang sama dengan alumni pendidikan umum yang lain, dengan syarat pendidikan yang

⁶ Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam, *Petunjuk Teknis Pondok Pesantren*, (Jakarta : Departemen Agama, 2004) h. 75

dilaksanakan di pondok pesantren tersebut mengikuti aturan yang ditetapkan oleh pemerintah melalui Dirjend Pendidikan Islam Kementerian Agama RI.

Manajemen pendidikan merupakan satu kesatuan yang utuh, yang di dalamnya mencakup berbagai aspek manajemen, yaitu manajemen kurikulum, ketenagaan, kesiswaan, sarana dan prasarana, keuangan, hubungan masyarakat dan manajemen layanan khusus.⁷ Dalam pengelolaan lembaga pendidikan termasuk pondok pesantren, tentu dibutuhkan manajemen yang professional, dan dapat menjamin ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan, sumber daya manusia, sumber dana yang mencukupi dan sebagainya.

Sebagaimana dikemukakan oleh Dhofier, bahwa unsur –unsur dasar yang membentuk lembaga pondok pesantren adalah Kiai, masjid, asrama, santri dan kitab kuning. Unsur kiai menempati posisi sentral dalam komunikasi pesantren, karena kiai dianggap sebagai pemilik, pengelola, dan pengajar sekaligus merangkap imam (pemimpin) pada acara-acara ritual keagamaan.⁸ Sukamto, sedangkan unsur lainnya seperti masjid, asrama, santri, dan kitab kuning bersifat subsider yang keberadaannya di bawah kontrol kiai.⁹

Berdasarkan ciri-ciri, pondok pesantren dapat digolongkan menjadi tiga bentuk, yaitu pesantren *salaf* (tradisional), *khalaf* (modern), dan *salafi-khalafi* (perpaduan tradisional-modern). Pondok pesantren salafi sering disebut *salafiyah* tradisional mempunyai ciri-ciri antara lain: Mempertahankan hal-hal yang bersifat salaf (terdahulu), selektif terhadap hal-hal yang baru.

⁷Mulyasa, *Manajemen Berbasis Sekolah*, (Bandung; Remaja Rosdakarya, 2006), h. 10.

⁸.Dhofier, *Tradisi Pesantren: Studi Tentang Pandangan Hidup kiai*, Jakarta, hln, 44

⁹. Sukamto, *Kepemimpinan Kiai Dalam Pesantren*, hln, 12

Pondok pesantren merupakan suatu sistem pendidikan dan pengajaran yang mempunyai ciri khas. Ia bukan sekolah umum yang diselenggarakan oleh pemerintah (Diknas) atau organisasi-organisasi lain yang bernaung dibawahnya.

Pada awal lahirnya pondok pesantren pengajaran dilakukan secara tradisional dan masih bersifat klasik, sehingga dapat dikatakan bahwa sistem pendidikan dan gambaran pesantren murni. Akan tetapi dewasa ini banyak pondok pesantren yang berubah bentuk, baik yang berubah secara total atau mengadopsi pendidikan formal sementara disisi lain masih mempertahankan tradisinya.

Mengutip keputusan Menteri Agama RI No.3/1979, Ahmad Janan Asibiddin mengklasifikasikan pondok pesantren ke dalam empat gaya, yaitu;

1. Pondok pesantren gaya A, adalah pondok pesantren dimana para santri belajar dan bertempat tinggal bersama dengan guru (kiai), kurikulumnya terserah pada kiai, cara memberi pelajaran individual, dan tidak menyelenggarakan untuk madrasah.
2. Pondok pesantren gaya B, ialah pondok pesantren yang mempunyai madrasah dan mempunyai kurikulum, pengajaran dari kiai dilakukan dengan stadium genneral, kiai memberikan pelajaran umum kepada santrinya pada waktu yang telah ditentukan, para santri tinggal dilingkungan itu dan mengikuti pelajaran dari kiai disamping mendapat ilmu pengetahuan agama dan umum di Madrasah.
3. Pondok pesantren gaya C, yaitu pondok pesantren yang fungsi umumnya hanya sebagai tempat tinggal atau asrama, santri-santrinya belajar di Madrasah atau

sekolah-sekolah umum, fungsi kiai hanya sebagai pengawas, pembina mental dan pengajar asrama.

4. Pondok pesantren tipe D, yaitu pondok pesantren yang menyelenggarakan sistem pondok dan sekaligus sistem sekolah umum dan Madrasah.

Pondok Pesantren (PP) Assunniyyah adalah Pondok Pesantren Khalafiah atau Ashriyah yaitu pondok pesantren yang mengadopsi sistem madrasah kurikulum disesuaikan dengan kurikulum pemerintah, yaitu Kementerian Agama Pondok Pesantren Assunniyyah adalah salah satu pondok pesantren yang cukup menonjol dan sangat diminati karena pendidikan di pondok tersebut menggabungkan antara kurikulum pemerintah dengan kurikulum pondok, ini merupakan nilai plus dari pondok-pondok pesantren yang ada di Kabupaten Tapin. Pimpinan/pengasuh Pondok Pesantren tersebut adalah oleh KH. Imansyah Amir, Lc. yang merupakan salah satu ulama kharizmatik dan mempunyai segudang ilmu pengetahuan khususnya pengetahuan agama Islam. Pondok Pesantren tersebut melaksanakan pendidikan tingkat MI, Tsanawiyah dan Aliyah. Adapun Animo masyarakat untuk memasukkan anaknya ke pesantren tersebut sangat tinggi, khususnya pada tingkat Madrasah Tsanawiyah Assunniyyah yang diselenggarakan Pondok Pesantren Assunniyyah, terbukti setiap tahun santri-santrinya terus bertambah. Keberadaan pondok pesantren ini juga cukup maju. Hal ini disebabkan sistem pengelolaan (manajemen pendidikan) Madrasah Tsanawiyah Pondok Pesantren Assunniyyah yang cukup baik, terutama di segi manajemen kurikulum, ketenagaan, sarana dan prasarana, kesiswaan, keuangan dan hubungan masyarakat.

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti pendidikan Pondok Pesantren Assunniyyah tersebut, terutama Manajemen Madrasah Tsanawiyah Pondok Pesantren Assunniyyah Tambarangan.

B. Fokus Penelitian

Dari latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka fokus penelitian ini adalah Manajemen Madrasah Tsanawiyah Pondok Pesantren Assunniyyah Tambarangan yang meliputi :

1. Bagaimana Manajemen kurikulum ?
2. Bagaimana Manajemen Ketenagaan?
3. Bagaimana Manajemen Sarana dan Prasarana?
4. Bagaimana Manajemen Kesiswaan?
5. Bagaimana Manajemen Keuangan ?
6. Bagaimana Manajemen hubungan lembaga masyarakat?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan fokus penelitian, maka penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan manajemen Madrasah Tsanawiyah Pondok Pesantren Assunniyyah Tambarangan yang meliputi :

1. Manajemen kurikulum
2. Manajemen Ketenagaan
3. Manajemen Sarana dan Prasarana
4. Manajemen Kesiswaan

5. Manajemen Keuangan
6. Manajemen hubungan lembaga masyarakat

D. Mampaat Penelitian

Penelitian ini setidaknya diharapkan mampu memberikan dua kontribusi besar yaitu:

1. Aspek teori.

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah informasi keilmuan di bidang pendidikan di pondok pesantren khususnya berkaitan dengan manajemen. Dalam penyelenggaraan pendidikan di Pondok Pesantren ditekankan terwujudnya manajemen pendidikan yang mantap sehingga lembaga pendidikan pesantren tersebut tetap bertahan dan berkembang di tengah arus persaingan yang semakin kuat khususnya di lingkungan pondok pesantren. Dan memberikan informasi ilmiah guna mengambil keputusan-keputusan dan kebijakan-kebijakan pendidikan di daerah, khususnya di lingkungan pondok pesantren.

2. Aspek praktis

Kegunaan praktis yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai bahan masukan bagi pimpinan, guru-guru, masyarakat, tokoh agama, pemerhati pendidikan, pemerintah daerah dan pihak terkait dalam rangka meningkatkan manajemen pendidikan pada pondok Pesantren Assunniyyah. Dan bagi peneliti adalah sebagai pengetahuan dan referensi untuk meningkatkan dunia pendidikan.

E. Definisi Operasional

Untuk memperjelas arah dan ruang lingkup penelitian, maka penulis membatasi permasalahan sesuai dengan istilah sebagai berikut :

1. Manajemen: manajemen berasal dari Bahasa Latin, yaitu dari asal kata *manus* yang berarti tangan dan *agree* yang berarti melakukan. Kata-kata itu digabung menjadi kata kerja *managere* yang artinya menangani. *Managere* diterjemahkan ke dalam Bahasa Inggris dalam bentuk kata kerja *to manage*, dengan kata benda *management*, dan *manager* untuk orang yang melakukan kegiatan manajemen. Akhirnya, *management* diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi manajemen atau pengelolaan.¹⁰ yang dimaksud dengan manajemen dalam penelitian ini adalah proses kerjasama di antara orang-orang yang terlibat dalam proses pendidikan di Pondok Pesantren Assunniyyah, mencakup bidang manajemen kurikulum, ketenagaan, kesiswaan, sarana dan prasarana, keuangan/pendanaan dan hubungan masyarakat.
2. Pondok Pesantren Assunniyyah, adalah lembaga pendidikan Islam yang menyelenggarakan Madrasah Tsanawiyah dimana pondok pesantren tersebut menggabungkan kurikulum umum yang menyelenggarakan Program Swajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan kurikulum pondok, yang pengelolaannya berada di bawah Yayasan Pondok Pesantren Assunniyyah. Yang menerapkan fungsi-fungsi manajemen yaitu perencanaan (*Planning*),

¹⁰Husaini Usman, *Manajemen Teori, Praktik, dan Riset Pendidikan*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006), h. 2.

Pengorganisasian, (*organizing*), Penggerakan (*actating*), dan Pengawasan (*controlling*).

F. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu yang menurut peneliti relevan dan terkait langsung dengan persoalan akademik yang hendak dibahas adalah:

Pertama, Penelitian tesis yang dilakukan Mohamad Nursalim Azmi (2005) dengan judul "*Dinamika Pondok Pesantren Al-Falah*" lokasi penelitian di pesantren Al-Falah landasan Ulin Banjarbaru. Akan tetapi penelitian yang dilakukan Mohamad Nursalim Azmi tidak terfokus pada manajemen, melainkan pada Dinamika Pondok Pesantren.

Kedua, Penelitian Raihanah, *Perkembangan Kurikulum pada Pesantren Rasyidiyah Khalidiyah Amuntai Kalimantan Selatan*, Tesis Program Pascasarjana IAIN Antasari, 2004. Penelitian tersebut hanya menitikberatkan pada perkembangan kurikulum, dari waktu ke waktu, sedangkan penelitian penulis tentang manajemen pendidikan di Madrasah Tsanawiyah Pondok Pesantren Assunniyyah.

Ketiga, Penelitian Maharuddin, *Kepemimpinan Kiai Pondok Pesantren Hidayatullah Balik Papan*, Tesis Program Pascasarjana IAIN Antasari, 2009. Penelitian tersebut membahas tentang kepemimpinan dalam mengelola pondok pesantren. Sedang penulis menitik beratkan pada manajemen kurikulum, ketenagaan, sarana dan prasarana, kesiswaan, keuangan, hubungan lembaga dengan masyarakat.

Keempat, penelitian Muhammad Tang, *Manajemen Sumberdaya Manusia di Pondok Pesantren Hidayatullah Balikpapan*. Tesis Program Pascasarjana IAIN Antasari Banjarmasin tahun 2008. Penelitian ini menitikberatkan pada Manajemen Sumber Daya Manusia, sedang penulis menitik beratkan pada manajemen madrasah.

Secara keseluruhan penelitian-penelitian di atas belum menyentuh aspek-aspek dalam penelitian ini, yaitu tentang Manajemen Pondok Pesantren Assunniyyah Tambarangan Kabupaten Tapin.

G. Sistematika Pembahasan

Rencana penulisan tesis ini terbagi menjadi enam bab yaitu bab I pendahuluan berisi latar belakang masalah yang diteliti, kemudian menetapkan focus dan tujuan penelitian, menyebutkan mampaat penelitian baik secara teoritis maupun praktis, membuat definisi operasional agar penelitian tidak melebar, menyebutkan penelitian-penelitian terdahulu, dan menguraikan sistematika penulisan yang akan digunakan dalam penelitian.

Bab II adalah landasan teori, membahas tentang pengertian manajemen, fungsi-fungsi manajemen, pengertian pondok pesantren, unsur-unsur pesantren. Kemudian diuraikan lagi tentang manajemen pendidikan pada Madrasah Tsanawiyah yang meliputi manajemen kurikulum, ketenagaan, kesiswaan, sarana dan prasarana, keuangan, dan hubungan lembaga dengan masyarakat, dan kepala madrasah dan guru sebagai manajer pendidikan.

Bab III adalah metode penelitian membahas tentang jenis penelitian, obyek dan subyek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data, dan pengecekan keabsahan data. Aspek-aspek yang dikemukakan berisikan teknis-teknis yang digunakan dalam penelitian lapangan.

Bab IV adalah paparan data penelitian, bab ini menguraikan data tentang deskripsi singkat lokasi penelitian pada Madrasah Tsanawiyah Pondok Pesantren Assunniyyah Tambarangan dan membahas tentang penerapan manajemen kurikulum, ketenagaan, kesiswaan, sarana dan prasarana, keuangan dan hubungan lembaga dengan masyarakat.

Bab V adalah pembahasan, bab ini membahas terhadap manajemen Madrasah Tsanawiyah Pondok Pesantren Assunniyyah yang meliputi: manajemen kurikulum, ketenagaan, sarana dan prasarana, kesiswaan, keuangan dan hubungan lembaga dengan masyarakat.

Bab VI adalah penutup, bab ini merupakan bagian akhir yang menutup seluruh uraian, berisikan simpulan serta saran-saran agar dapat dilaksanakan untuk meningkatkan manajemen pendidikan khususnya pada lembaga pendidikan Madrasah Tsanawiyah Pondok Pesantren Assunniyyah Tambarangan yang diteliti.

